



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUROTO HERU SANTOSO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 218975

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 330.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/135 m2 di KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 17.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 359.950.000

III. HUTANG Rp. 98.416.667

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 261.533.333

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **25 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.